Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26844-26851

Evaluasi Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua

Angelica Salsabil Nabila[1], Wilda Zuliasari[2], Indah Prabawati[3], Firre An Suprapto[4]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Corresponding author: Angelica Salsabil, E-Mail: 25040674342@mhs.unesa.ac.id

Published: May, 2026

ABSTRAK
Di era revolusi industri, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Papua pada bulan Maret 2025 meningkat menjadi 19,16% dibandingkan dengan bulan Maret 2024 sebesar 17,26%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Oleh karna itu, upaya pengurangan kemiskinan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Distribusi Pendapatan

ABSTRACT
In the era of the industrial revolution, poverty remains a primary challenge in Indonesia, particularly in Papua Province. According to data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the poverty rate in Papua rose to 19,16% in March 2025, compared to 17,26% in March 2024. This study aims to analyze the impact of poverty levels on economic growth in Papua Province, employing economic growth, income distribution inequality, and the Human Development Index (HDI) as variables. The research adopts a quantitative approach, utilizing secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS) for the period 2020–2025. The findings indicate that poverty levels are associated with economic growth in Papua Province. Therefore, poverty reduction efforts constitute a critical factor in promoting more equitable and sustainable economic growth.

Keywords: *Poverty, Economic Growth, Human Development Index, Income Distribution Inequality*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Permasalahan yang masih sering dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kronis dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan. Kemiskinan menjadi penyebab turunnya kualitas sumber daya (SDM) karena adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan nutrisi yang baik sehingga berimbas pada lemahnya tingkat produktivitas (Agus Triono et al., 2023). Salah satu tingkat kemiskinan paling tinggi terjadi di Provinsi Papua. Pada tahun 2020-2025 rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Papua mencapai 23,64% mengartikan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yakni pada tahun 2025 sebanyak 171,38 ribu jiwa. Hal ini cukup memprihatinkan, karena persentase kemiskinan Provinsi Papua cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Menurut Kuncoro dalam Austina (2018: 269) terdapat tiga penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, kemiskinan terjadi akibat adanya ketidaksamaan pemilik sumber daya sehingga terjadi ketimpangan. Kemudian, disebabkan oleh kualitas SDM yang rendah sehingga produktivitasnya rendah yang akan menurunkan tingkat upah. Dengan masih adanya kemiskinan sebagai permasalahan bagi pembangunan ekonomi, hal ini menunjukan bahwa tujuan satu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih belum tercapai.

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam suatu rumah tangga disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diterima. Memburuknya kemiskinan terjadi akibat jumlah kemiskinan yang banyak dimana jumlah anggota keluarga miskin akan semakin meningkat (Todaro dalam Nisa, 2020:57).

Menurut Sugiyarto (201:116), hubungan ketimpangan dan kemiskinan adalah hubungan pragmatis, yakni kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan atau kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan atau kemiskinan terbentuk dari ketimpangan. Ketimpangan di suatu daerah akan memunculkan suatu masalah seperti peningkatan migrasi, tindakan criminal, dan konflik antar penduduk (Fahrizal, 2019:400). Pada tahun 2025 Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi ketimpangan tertinggi se Indonesia dengan nilai ketimpangan sebesar 0,404%. Provinsi Papua berada pada kondisi ketimpangan distribusi sedang. Sementara pada masing-masing daerah administrative baik kabupaten maupun kota, memiliki nilai yang berbeda-beda. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi ketidakmerataan pada pendistribusian pendapatan penduduk pada masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur kesejahteraan masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan di suatu wilayah akan meningkat dan akan meningkatkan pendapatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi memberi efek cucuran ke bawah atau *trickle down effect* pada perekonomian suatu wilayah. Namun, pada penelitian Anzwar (2016:10) bahwa sebagian negara sedang berkembang termasuk Indonesia, baik di tingkat nasional ataupun regional, hanya terdapat suatu golongan masyarakat tertentu saja yang menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan adanya manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bersifat inklusif yang kemudia akan mengakibatkan memburuknya kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tingkat daerah meunjukkan adanya kesenjangan. Dimana Kabupaten Mimika memiliki pertumbuhan ekonomi yang terlalu besar dibanding dengan kabupaten dan kota lainnya. Hal ini karena adanya pertambangan oleh PT Freeport, sehingga Kabupaten Mimika memiliki pendapatan daerah yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebagian besar ditopang oleh pendapatan sektor pertambangan.

Provinsi Papua dapat dikatakan mmapu memiliki modal yang berlimpah dan sangat mendukung untuk dapat mengembangkan, menata, mengelola, dan mengunggulkan segala bentuk potensi yang ada di daerahnya (Ismail, 2020). Potensi kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Papua seharusnya dapat memberikan konstribusi bagi perkembangan dan keberlangsungan daerah-daerah di sekitarnya. Namun faktanya, Provinsi Papua masih belum mampu mengelola dan mengunggulkan potensinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program untuk mengurangi kemiskinan dengan melalui bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta melakukan pelatihan agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Namun, masih terdapat beberapa kendala diantaranya, yaitu keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai evaluasi pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Lingkaran Setan (Vicious Cycle)

Kualitas penduduk atau sumber daya diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas penduduk yang baik dapat mempengaruhi kelancaran roda perekonomian. Besar kecilnya produktivitas penduduk digambarkan oleh tinggi rendahnya IPM. Jadi, semakin tinggi IPM akan mendorong peningkatan produktivitas penduduk dan akan mempengaruhi peningkatan terhadap tingkat pendekatan penduduk. Sebaliknya, jika IPM rendah maka dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk yang cenderung menurun. Hal tersebut terjadi karena tinggi dan rendahnya IPM dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang menentukan produktivitas dan mendorong tingkat pendapatan. Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, namun pada tahun 2020 IPM Provinsi Papua berada pada taraf rendah sebesar 60,44% yang mengartikan bahwa pembangunan manusa di Provinsi Papua masih rendah. Pada tahun 2025 IPM Provinsi Papua meningkat sebesar 76,69 yang sudah berada pada taraf pembangunan manusia sedang. Hal tersebut tidak terlepas dari perbaikan bidang pendidikan dan kesehatan.

Teori Jumlah Penduduk

Thomas Robert Malthus (1798) dalam (Atmani, 2017) mengemukakan teori "*An Essay on then Principle of Population*" yang membahas mengenai jumlah penduduk. Malthus pada teorinya mengemukakan bahwa dasarnya tanah adalah faktor produksi utama yang memiliki jumlah tetap, sedangkan manusia memiliki nilai yang berkembang. Keberlanjutan pada petumbuhan penduduk menjadi faktor yang sangat penting dan diperlukan dalam mendukung suatu permintaan. Akan tetapi, jumlah penduduk atau populasi yang semakin tinggi dikhawatirkan akan berdampak negtaif pada meningkatnya biaya hidup. Kesulitan akan membiayai hidup yang terus meningkat ini akan berakibat kepada kondisi kemiskinan. Malthus menungkapkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pengawasan terhadap pertumbuhan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah sebuah langkah dalam proses memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat untuk kehidupan mereka, atau dapat dikatakan bahwa masyarakat diberikan berbagai pilihan untuk dipilih dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dan menjalani kehidupan yang terhormat dari segi sosial, ekonomi, dan budaya (United Nations Development, 1990). Pada tahun 1990, UNDP menetapkan tiga indikator pembentukan IPM yang tidak mengalami perubahan hingga saat ini adalah:

1. Usia yang panjang dan hidup yang sehat
2. Standar kehidupan yang layak
3. Pengetahuan.

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh adanya peningkatan pada kualitas SDM yang ditandai oleh peningkatan pada IPM yang sejalan dengan peningkatan produktivitas sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pernyataan ini sejalan dengan teori Ragnar Nurkse (1935) yaitu pendidikan tinggi.

Teori Pertumbuhan

Teori pertumbuhan Harrod - Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap (steady growth). Pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan. Harrod - Domar memberikan peran penting dalam pembentukan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi negara. Investasi dianggap faktor penting karena memiliki dua karakter atau dua peran sekaligus dalam mmpengaruhi perekonomian, yaitu pertama investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan, artinya investasi mempengaruhi sisi permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan mempengaruhi dari sisi penawaran. (Lincolin Arsyad, 2010:82-83).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *library research*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi sosial dan ekonomi melalui analisis data statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020-2025. Data tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan statistik, publikasi pemerintah, serta sumber data lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk melihat perkembangan tingkat kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya evaluasi

pengurangan kemiskinan sebagai salah satu faktor penting yang mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi paling miskin di Indonesia. Pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.303.707 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 911,37 ribu jiwa. Jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 0,22% karena adanya dampak dari COVID-19. Namun sejak tahun 2022 sampai dengan Maret 2024 mengalami penurunan sebanyak 9,6%. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebanyak 1,9% karena adanya inflasi yang tidak terkendali yang menurunkan daya beli masyarakat, hal ini dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin, terutama pada kelompok rentan miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2020 sampai dengan Maret 2025 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1. Kemiskinan di Provinsi Papua 2020-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	%Penduduk Miskin	IPM
2020	911,37 ribu jiwa	26.64%	60,44
2021	920,44 ribu jiwa	26,86%	60,62
2022	922,12 ribu jiwa	26,56%	61,39
2023	915,15 ribu jiwa	26,03%	73,23
2024	152,91 ribu jiwa	17,26%	73,83
2025	171,38 ribu jiwa	19,16%	76,69

Sumber: BPS Provinsi Papua

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan di Provinsi Papua salah satunya dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan pada tabel terlihat bahwa IPM Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah 60,44% kemudian mengalami peningkatan sebesar 0,18% menjadi 60,62% pada tahun 2022. Lalu, di tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,44% menjadi sebesar 73,83%. Namun, di tahun 2025 IPM Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 2,89% menjadi 76,69%. Dari hasil IPM tersebut, Provinsi Papua berada di kategori tinggi karena berada di rentang antara 70 hingga 80. Nilai IPM sangat berpengaruh daerah yang berdampak positif maupun negatif, jika nilai IPM tinggi akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas penduduk, konsumsi rumah tangga yang baik, dan peningkatan produktivitas kerja. Sebaliknya, jika IPM rendah akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Jadi, IPM sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan pembangunan manusia serta memiliki pengaruh yang inkonsistensi terhadap indeks kedalaman kemiskinan sebagai indicator untuk melihat kemiskinan di Provinsi Papua.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: BPS Provinsi Papua

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia,

mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak. Situasi ini akan menambah produktivitas kerja, memperluas lapangan kerja, serta mendorong kenaikan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam studi ini, peningkatan IPM di Papua dapat dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa periode, meskipun ada fluktuasi yang terjadi. Saat IPM meningkat, secara umum pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat pula. Sebaliknya, jika kualitas pembangunan manusia rendah, hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan teori modal manusia yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, IPM tidak hanya berdampak pada pembangunan manusia, tetapi juga merupakan faktor yang membantu dalam pengurangan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2020 hingga tahun 2025 triwulan I berdasarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 46,31 triliun dan dengan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 32,29 triliun. Ekonomi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 1,48%, kemudian mengalami penurunan tajam di tahun 2021 sebesar -13,14%. Selanjutnya, di tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan sebesar 13,13% namun, di tahun 2023 mengalami penurunan lagi sebesar -2,39%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat cukup tinggi sebesar 17,49% dan mengalami penurunan lagi di tahun 2025 sebesar 3,91%. Fluktasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Provinsi Papua masih belum stabil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi nasional, pandemi covid-19, serta aktivitas sektor-sektor ekonomi utama.

PDRB terbesar di Provinsi Papua dari tahun 2020 hingga tahun 2025 adalah Kota Jayapura. Hal ini dipengaruhi oleh ekonomi yang lebih maju. Kota jayapura merupakan ibu kota dari Provinsi Papua jadi, Kota Jayapura berperan sebagai pemerintahan pusat, perdagangan, dan didominasi oleh sektor jasa sehingga membuat perekonomian lebih cepat berputar di Kota Jayapura. Selain itu, Kota Jayapura memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua. Jumlah penduduk yang lebih padat dapat berkontribusi pada tingginya konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu komponen utama dalam pembentukan PDRB.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan I

Tahun	**Pertumbuhan Ekonomi Papua Triwulan I**				
	PDRB ADHB	**PDRB ADHK**	**y-on-y**	**q-to-q**	**c-to-c**
2020	46,31 Triliun	32,29 Triliun	1,48%	-6,77%	1,48%
2021	54,32 Triliun	36,84 Triliun	-13,14%	-3,08%	-13,14%
2022	63,928 Triliun	-	13,33%	-3,54%	13,33%
2023	65,29 Triliun	-	-2,39%	-8,23%	-2,39%
2024	78.077,34 Miliar	-	17,49%	-2,68%	17,49%
2025	21.834,86 Miliar	-	3,91%	-1,53%	3,91%

Sumber: BPS Provinsi Papua

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto dan Persentase Kemiskinan di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	**PDRB ADHB**						**% Penduduk Miskin 2025**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
Jayapura	7,96	7,16	6,97	23,73	23,87	23,84	13,03
Kepulauan Yapen	2,07	1,86	1,78	6,14	6,16	6,13	28,00
Biak Numfor	2,6	2,31	2,24	7,76	7,66	7,59	25,73

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB						% Penduduk Miskin 2025
Sarmi	1,46	1,3	1,26	4,4	4,47	4,47	15,17
Keerom	1,46	1,29	1,22	4,18	4,23	4,2	17,76
Waropen	1,02	0,89	0,88	2,86	2,86	2,88	32,60
Supiori	0,52	0,46	0,43	1,45	1,46	1,45	42,56
Mamberamo Raya	0,86	0,77	0,75	2,65	2,69	2,68	35,09
Kota Jayapura	15,96	13,93	13,49	46,85	46,6	46,75	12,03

Sumber: BPS Provinsi Papua

PDRB adalah indikator penting untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan pada PDRB menandakan adanya lonjakan aktivitas ekonomi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif Provinsi Papua, perubahan PDRB mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat. Ketika PDRB naik, secara teoritis pendapatan masyarakat juga punya peluang untuk meningkat dan membantu menekan angka kemiskinan.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kenaikan PDRB, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia (IPM) dan sejauh mana pemerataan pendapatan (gini ratio). Ketiga indikator ini saling berhubungan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan PDRB tanpa diiringi dengan IPM yang baik dan distribusi pendapatan yang merata tidak menjamin pengurangan kemiskinan yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan gagasan pertumbuhan ekonomi tradisional yang menyebutkan bahwa peningkatan dalam produksi dan kegiatan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. PDRB sebagai indikator utama merefleksikan tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah, di mana kenaikan PDRB menandakan adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi, hubungan antara PDRB, IPM, dan rasio gini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dipengaruhi oleh interaksi antara kualitas sumber daya manusia, distribusi pendapatan, dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur melalui gini ratio. Gini ratio merupakan alat ukur statistik yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribui pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Gini ratio Provinsi Papua pada tahun 2020 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 gini ratio Provinsi Papua sebesar 0,392, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 0,397. Ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan gini ratio tahun 2023 sebesar 0,406 dan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,386. Pada tahun 2024 mengalami penurunan lagi sebesar 0,362 namun, di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,404.

Fluktuasi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak merata dan perubahan kondisi ekonomi makro saat pandemi covid-19. Fluktuasi tersebut menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bersifat tidak stabil dan belum inklusif.

Tabel 5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tahun	Gini Ratio Provinsi Papua		
	Kota	Desa	Kota + Desa
2020	0,296	0,414	0,392
2021	0,301	0,422	0,397
2022	0,315	0,427	0,406
2023	0,3	0,403	0,386
2024	0,299	0,418	0,362
2025	0,314	0,511	0,404

Sumber: BPS Provinsi Papua

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan, yang diukur menggunakan gini ratio, mencerminkan sejauh mana pemerataan pendapatan di masyarakat. Nilai gini ratio yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan yang besar dan bisa menghambat proses pertumbuhan ekonomi yang merata. Keadaan ini

menunjukkan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya berfokus pada kelompok atau daerah tertentu. Ketidakmerataan ekonomi mengakibatkan manfaat pembangunan tidak didistribusikan dengan adil, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi.

Di Provinsi Papua, ketimpangan dalam penghasilan menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Saat ketimpangan semakin tinggi, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan menjadi berkurang karena masyarakat berpenghasilan rendah tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara maksimal. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan lebih adil, pertumbuhan ekonomi bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan teori Kuznets, yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada awal proses pembangunan, tetapi akan menurun seiring dengan kemajuan ekonomi. Namun, dalam konteks Papua, ketimpangan yang masih fluktuatif menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi belum sepenuhnya mencapai tahap pemerataan yang solid.

Berdasarkan dari data-data tersebut, di tahun 2020 hingga 2025 penduduk miskin di Provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, yaitu:

a. Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain, yang menunjukkan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengakibatkan penururnan produktivitas, terbatasnya kesempatan kerja, dan peningkatan angka kemiskinan yang semakin buruk karena ketidakmerataan dalam pembangunan antar daerah. IPM yang tinggi akan berpengaruh pada kualitas SDM yang dapat mendorong kenaikan pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
b. Dampak Covid-19 yang menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi (Yuniarti & Sukarniati, 2021). Penerapan *social distancing*, PSBB, hingga PPKM, roda perekonomian mulai berjalan lambat yang berdampak pada sistem jadi tidak berjalan dengan baik. Hal itu membuat perekonomian menjadi turun yang akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan.
c. Inflasi dan kenaikan harga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Lalu, inflasi mempengaruhi masyarakat menjadi sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.
d. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih minim sehingga berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ini membuat masyarakat sulit untuk memperoleh pendapatan yang berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Provinsi Papua masih merupakan isu penting yang berdampak pada perkembangan ekonomi daerah. Angka kemiskinan yang tinggi mengindikasikan bahwa potensi kekayaan alam Papua belum dapat memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan pada sektor tambang.

Penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini terhadap tingkat kemiskinan di Papua. Peningkatan IPM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang ada masih kurang inklusif, karena manfaat dari pembangunan lebih banyak dirasakan oleh wilayah dan kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum mampu secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang lebih adil bagi semua masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lebih banyak lapangan kerja, pemerataan infrastruktur, dan pengendalian ketidakmerataan pendapatan adalah langkah-langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Papua yang berkelanjutan dan lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

Syahrazad, L., & Vidriza, U. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2017–2022. *Jurnal of Development Economic and Digitalization.*

Agus Triono, A., dkk. (2023). Kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Profil Kemiskinan di Papua Maret 2020*. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Profil Kemiskinan di Papua Maret 2021*. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kemiskinan di Papua Maret 2022*. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Papua Maret 2023*. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Papua Maret 2024*. BPS Provinsi Papua.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Papua Maret 2025*. BPS Provinsi Papua.

UNDP Indonesia. (2023). *Human development report Indonesia 2023*. UNDP Indonesia.

Fahrizal. (2021). Ketimpangan distribusi pendapatan dan dampaknya terhadap kemiskinan. *Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia.*

Easterly, W. (1999). The ghost of financing gap: Testing the growth model used in the international financial institutions. *Journal of Development Economics.*

Wijayanti, D., Ramadhani, S. N., & Wibowo, B. S. (2025). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*.

Kusumawati, A., Badriah, L. S., & Arifin, A. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal, IPM, panjang jalan terhadap kemiskinan di Papua. EKONOMIKA45: *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*.

Kurniawan, R. (2021). Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*.

Sari, D., & Nugroho, T. (2024). Analisis gini ratio terhadap ketimpangan pendapatan di Papua. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*.

Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi.*

Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*.

Aspiansyah, A., & Damayanti, A. (2019). Model pertumbuhan ekonomi Indonesia: Peranan ketergantungan spasial. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.